



Kristiani Hutaeruk<sup>1</sup>

## PERAN ETIKA DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGUATAN PROGRAM LINTAS SEKTOR UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN CILACAP

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cilacap, meskipun berbagai program lintas sektor telah dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika dan akuntabilitas dalam meningkatkan efektivitas program lintas sektor serta memberikan rekomendasi strategis untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data study pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran etika dan akuntabilitas sangat krusial dalam meningkatkan efektivitas program lintas sektor di Kabupaten Cilacap untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Penerapan prinsip etika yang kuat dalam pengelolaan program dapat memastikan keadilan, transparansi, dan integritas dalam setiap tahap pelaksanaannya, sementara akuntabilitas yang baik akan memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya komitmen terhadap etika, sistem pengawasan yang lemah, serta rendahnya kapasitas pengelola program. Untuk itu, penerapan strategi peningkatan kapasitas melalui pelatihan, penggunaan teknologi informasi untuk transparansi, dan penguatan koordinasi antar sektor serta partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperbaiki tata kelola program, sehingga meningkatkan dampak pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.

**Kata kunci:** Etika, Akuntabilitas, Kemiskinan, Cilacap

### Abstract

This research is motivated by the high rate of extreme poverty in Cilacap Regency, even though various cross-sector programs have been implemented. This study aims to analyze the role of ethics and accountability in increasing the effectiveness of cross-sector programs and provide strategic recommendations to support sustainable extreme poverty alleviation. The research method is qualitative with a literature study data collection technique. The results of the study indicate that the role of ethics and accountability is very crucial in increasing the effectiveness of cross-sector programs in Cilacap Regency for extreme poverty alleviation. The application of strong ethical principles in program management can ensure fairness, transparency, and integrity at every stage of its implementation, while good accountability will strengthen the supervision and monitoring system that actively involves the community. The main challenges faced include a lack of commitment to ethics, a weak supervision system, and low capacity of program managers. For this reason, the application of capacity building strategies through training, the use of information technology for transparency, and strengthening coordination between sectors and community participation can be an effective solution to improve program governance, thereby increasing the impact of extreme poverty alleviation in the area..

**Keywords:** Ethics, Accountability, Poverty, Cilacap

### PENDAHULUAN

Kemiskinan ekstrem merupakan isu mendesak yang terus menjadi tantangan bagi pemerintah di berbagai wilayah Indonesia. Kabupaten Cilacap, meskipun memiliki potensi

<sup>1</sup> Universitas Jenderal Soedirman  
 email: hutaeruk.kristi@gmail.com

ekonomi dari sektor industri, pertanian, dan kelautan, masih menghadapi tingkat kemiskinan ekstrem yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Cilacap masih berada di atas rata-rata provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk program-program lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Namun, hasilnya belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan program tersebut (Anwar, 2023).

Fenomena permasalahan yang terjadi di Kabupaten Cilacap mencerminkan kompleksitas kemiskinan ekstrem yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kelemahan dalam tata kelola program pengentasan kemiskinan. Dalam beberapa kasus, ditemukan tumpang tindih program antara instansi pemerintah dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan yang menyebabkan inefisiensi sumber daya (Firdaus et al, 2022). Selain itu, distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaannya menjadi isu yang menghambat pencapaian tujuan. Hal ini diperburuk dengan lemahnya implementasi prinsip etika dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program, seperti rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana bantuan, minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan terbatasnya akses informasi mengenai hasil program tersebut (Cahyo et al, 2022).

Urgensi penelitian ini berakar pada pentingnya peran etika dan akuntabilitas dalam memperkuat program lintas sektor untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cilacap. Etika dalam tata kelola program mencakup penerapan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan integritas yang memastikan bahwa semua pihak bekerja untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas menjadi landasan utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan program yang dilaksanakan. Tanpa penguatan pada aspek ini, program lintas sektor berisiko menjadi tidak efektif dan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan program dengan mengintegrasikan prinsip etika dan akuntabilitas merupakan kebutuhan yang mendesak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran etika dan akuntabilitas dalam meningkatkan efektivitas program lintas sektor di Kabupaten Cilacap dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut, mengkaji bagaimana penerapan prinsip etika dan akuntabilitas dapat memperbaiki tata kelola program, serta memberikan rekomendasi strategis yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai etika.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penerapan etika dan akuntabilitas dalam administrasi publik di Kabupaten Cilacap. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial dan kelembagaan yang kompleks, terutama dalam konteks tata kelola pemerintahan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen pemerintah, laporan resmi, dan berita terpercaya. Data yang diperoleh akan mencakup aspek kebijakan administrasi publik, kasus-kasus terkait etika dan akuntabilitas di Kabupaten Cilacap, serta upaya reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang meliputi tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data : Data yang diperoleh dari studi pustaka diseleksi, disaring, dan dikategorikan berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, yaitu etika dan akuntabilitas administrasi publik. Informasi yang tidak relevan akan dieliminasi untuk mempertajam fokus analisis.
2. Penyajian Data : Data yang telah terorganisasi akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menunjukkan hubungan antara prinsip etika, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola di Kabupaten Cilacap. Penyajian ini juga akan mencakup ilustrasi kasus-kasus atau peristiwa yang menjadi sorotan di daerah tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi : Kesimpulan dibuat berdasarkan pola dan temuan yang muncul selama analisis data. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan dengan literatur relevan untuk memastikan keabsahan hasil

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran Etika Dan Akuntabilitas Untuk Meningkatkan Efektivitas Program Lintas Sektor Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Cilacap**

Pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cilacap memerlukan tata kelola program lintas sektor yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga etis dan akuntabel. Etika dan akuntabilitas memainkan peran penting dalam membangun kerangka kerja yang transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, kedua prinsip tersebut tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem. Etika dalam tata kelola program lintas sektor merupakan landasan moral yang menentukan kualitas implementasi program pengentasan kemiskinan ekstrem. Etika memastikan bahwa keputusan dan tindakan setiap aktor—baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil—didasarkan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan integritas (Salcedo et al, 2023). Di Kabupaten Cilacap, masih ditemukan tantangan dalam penerapan etika, seperti distribusi bantuan sosial yang kurang merata dan keberpihakan terhadap kelompok tertentu. Sebagai contoh, dalam program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), laporan lapangan menunjukkan adanya bias dalam pemilihan agen e-warung yang mengelola distribusi, yang terkadang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada masyarakat miskin yang menjadi target utama (Saragih et al, 2024).

Mengatasi masalah ini memerlukan penguatan prinsip etika dalam proses perencanaan hingga implementasi. Pemerintah harus memastikan bahwa semua kebijakan didesain berdasarkan data yang valid dan representatif. Pelibatan masyarakat dalam validasi data penerima bantuan, misalnya, dapat mengurangi risiko diskriminasi atau favoritisme. Selain itu, penetapan kode etik untuk semua pelaksana program, yang dilengkapi dengan sanksi tegas jika terjadi pelanggaran, dapat memperkuat integritas program. Dengan cara ini, etika tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih nyata (Setiawan et al, 2021).

Akuntabilitas adalah kunci untuk menciptakan tata kelola program yang transparan dan efisien. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan dalam program dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Namun, di Kabupaten Cilacap, terdapat kelemahan signifikan dalam sistem akuntabilitas program lintas sektor. Misalnya, program pembangunan infrastruktur pedesaan sering kali menghadapi kritik karena laporan penggunaan anggaran tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dan memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program tersebut (Suryaningrum et al, 2021).

Untuk meningkatkan akuntabilitas, pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi digital seperti platform daring untuk mempublikasikan laporan anggaran, hasil pelaksanaan, dan target capaian program. Contoh nyata implementasi teknologi dalam akuntabilitas adalah aplikasi yang dikembangkan di beberapa kabupaten untuk memantau distribusi bantuan secara langsung. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik dan melaporkan penyimpangan, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara real-time. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Susanto dan Sulaiman, 2022).

Etika dan akuntabilitas harus berjalan beriringan untuk menciptakan tata kelola lintas sektor yang efektif. Di Kabupaten Cilacap, program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok usaha tani menjadi contoh relevan bagaimana integrasi kedua prinsip ini dapat menghasilkan dampak positif. Dalam program ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan koperasi lokal untuk menyalurkan bantuan modal usaha kepada petani kecil. Prinsip etika diterapkan dengan memastikan bahwa penyaluran bantuan didasarkan pada kriteria yang jelas dan tanpa diskriminasi. Sementara itu, akuntabilitas diterapkan melalui mekanisme pelaporan keuangan secara berkala oleh koperasi kepada pemerintah dan anggota komunitas (Uptom et al, 2024). Hasilnya, program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani secara signifikan, tetapi

juga membangun rasa percaya di antara para pemangku kepentingan. Selain itu, kepercayaan ini menciptakan efek berkelanjutan, di mana petani yang berhasil meningkatkan pendapatannya kemudian menjadi mentor bagi kelompok tani lainnya. Sinergi etika dan akuntabilitas dalam program ini menunjukkan bahwa tata kelola berbasis nilai dapat memperkuat efektivitas program lintas sektor sekaligus menciptakan dampak jangka panjang (Wijaya dan Diana, 2024).

Penerapan etika dan akuntabilitas memiliki dampak konstruktif yang signifikan terhadap program pengentasan kemiskinan ekstrem. Di Kabupaten Cilacap, salah satu tantangan terbesar adalah keberlanjutan program setelah masa intervensi awal selesai. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang akuntabel, banyak program yang berhenti di tengah jalan atau kehilangan fokusnya. Dengan mengintegrasikan prinsip etika dan akuntabilitas, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap program memiliki mekanisme pengawasan yang jelas serta target capaian yang realistis dan terukur. Sebagai contoh, dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemerintah melibatkan tokoh masyarakat untuk memantau langsung pelaksanaan rehabilitasi. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab komunitas terhadap hasil program. Melalui penerapan etika dan akuntabilitas yang konsisten, program ini berhasil menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat miskin di Cilacap, sekaligus memberikan contoh model tata kelola yang dapat direplikasi di daerah lain (Suranto et al, 2021).

Keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem di Cilacap sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk membangun model tata kelola yang berbasis pada prinsip etika dan akuntabilitas. Model ini harus mencakup mekanisme koordinasi yang efektif antara sektor-sektor yang terlibat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan transparansi. Di samping itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pelaksana program, termasuk aparatur sipil negara dan pemimpin masyarakat, perlu menjadi prioritas untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kedua prinsip tersebut (Zameer et al, 2020).

#### **Tantangan dan Strategi Etika dan Akuntabilitas dalam Efektivitas Program Lintas Sektor untuk Pengentasan Kemiskinan di Cilacap**

Di Kabupaten Cilacap, penerapan etika dalam program lintas sektor menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitasnya dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya komitmen dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menerapkan prinsip keadilan dalam setiap aspek program. Dalam praktiknya, sering kali keputusan dalam penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi. Sebagai contoh, penunjukan pihak ketiga yang mengelola distribusi bantuan terkadang lebih didasarkan pada hubungan personal atau politik ketimbang kinerja dan kapasitas mereka dalam melayani masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berpotensi merusak prinsip keadilan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap program pemberdayaan (Singh dan Chudasama, 2021).

Selain itu, pemahaman yang terbatas tentang pentingnya etika dalam pengelolaan program juga menjadi hambatan. Beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi program terkadang kurang menyadari bahwa integritas dan transparansi dalam setiap tahap program adalah kunci keberhasilannya. Tanpa adanya kesadaran yang kuat tentang etika, penyimpangan-penyimpangan kecil bisa terjadi, seperti pemborosan anggaran, penyelewengan bantuan, atau pemberian kesempatan yang tidak adil bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan pemahaman etika di kalangan pelaksana program dan masyarakat (Putri et al, 2024).

Akuntabilitas dalam pengelolaan program lintas sektor juga menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi mengurangi efektivitas pengentasan kemiskinan di Cilacap. Salah satunya adalah lemahnya sistem pengawasan yang ada. Di banyak program pengentasan kemiskinan, terutama yang melibatkan dana besar, mekanisme evaluasi dan pelaporan sering kali tidak berjalan sesuai harapan (Ramdani et al, 2022). Misalnya, laporan penggunaan anggaran dan pencapaian program sering kali tidak dipublikasikan secara transparan atau tidak mencapai masyarakat yang menjadi sasaran. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga terkait, serta mengurangi partisipasi aktif mereka dalam pengawasan program (Rudiastuti et al, 2022).

Selain itu, rendahnya kapasitas aparat pemerintah dalam mengelola dan mengawasi program lintas sektor menjadi kendala lainnya. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas di kalangan birokrasi membuat mereka kesulitan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas secara efektif. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan penggunaan anggaran juga memengaruhi kemampuan pengawasan. Tanpa sistem yang efisien dan transparan, sulit untuk menjamin bahwa bantuan sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan bahwa dana yang disalurkan digunakan secara optimal (Li, 2024).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan berbagai strategi yang dapat menguatkan penerapan etika dan akuntabilitas dalam program lintas sektor di Kabupaten Cilacap. Salah satunya adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif bagi semua pihak yang terlibat, termasuk aparat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat (Sutriyono et al, 2020). Pelatihan ini harus menekankan pentingnya prinsip etika dalam setiap tahap pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Dengan peningkatan kapasitas dan pemahaman, diharapkan para pelaksana program dapat lebih objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam proses pengambilan keputusan (Kerhi, 2024).

Selain itu, penguatan mekanisme akuntabilitas dapat dilakukan dengan memperkenalkan sistem pelaporan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Penggunaan teknologi informasi menjadi kunci dalam hal ini. Misalnya, aplikasi atau platform daring yang dapat memonitor penyaluran bantuan dan memberikan laporan secara langsung kepada masyarakat (Agustino et al, 2022). Dengan adanya transparansi tersebut, masyarakat dapat lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan program. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa ada mekanisme yang jelas untuk menangani setiap laporan penyimpangan atau pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Lebih lanjut, penting untuk membangun sinergi antara berbagai sektor yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan, seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Sinergi ini dapat dijalankan melalui pembentukan tim koordinasi lintas sektor yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa seluruh program berjalan sesuai dengan prinsip etika dan akuntabilitas (Capasso et al, 2021). Koordinasi yang baik antara sektor-sektor tersebut akan mempercepat pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan dan menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat Cilacap.

Strategi lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan etika dan akuntabilitas adalah dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan program. Masyarakat lokal, sebagai penerima manfaat langsung, perlu diberikan akses untuk memantau dan menilai pelaksanaan program (Batool et al, 2023). Salah satu cara yang efektif adalah melalui forum-forum pertemuan atau mekanisme pelaporan berbasis komunitas, di mana mereka dapat menyampaikan masukan atau keluhan terkait pelaksanaan program. Selain itu, penting untuk memberikan penghargaan kepada komunitas yang berperan aktif dalam pengawasan dan memastikan bahwa setiap pelaporan yang dilakukan dihargai dan ditindaklanjuti dengan tepat (Guo dan Liu, 2022).

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap program yang sedang dilaksanakan (Kardawati et al, 2023). Hal ini dapat menciptakan rasa tanggung jawab kolektif yang besar, yang pada akhirnya akan mendorong keberhasilan program dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan strategi ini, Cilacap dapat membangun model pengelolaan program lintas sektor yang lebih inklusif dan transparan, serta memberikan dampak positif bagi pengurangan angka kemiskinan ekstrem. Melalui penerapan etika dan akuntabilitas secara konsisten dan strategis, program lintas sektor di Kabupaten Cilacap tidak hanya akan lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, tetapi juga akan menciptakan fondasi yang kuat bagi pengelolaan program di masa depan, berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Baharuddin et al, 2024).

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran etika dan akuntabilitas sangat krusial dalam meningkatkan efektivitas program lintas sektor di Kabupaten Cilacap untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Penerapan prinsip etika yang kuat dalam pengelolaan program dapat memastikan keadilan, transparansi, dan integritas dalam setiap tahap pelaksanaannya, sementara akuntabilitas yang baik akan memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya komitmen terhadap etika, sistem pengawasan yang lemah, serta rendahnya kapasitas pengelola program. Untuk itu, penerapan strategi peningkatan kapasitas melalui pelatihan, penggunaan teknologi informasi untuk transparansi, dan penguatan koordinasi antar sektor serta partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperbaiki tata kelola program, sehingga meningkatkan dampak pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agostino, D., Saliterer, I., & Steccolini, I. (2022). Digitalization, accounting and accountability: A literature review and reflections on future research in public services. *Financial Accountability & Management*, 38(2), 152-176.
- Anwar, C. (2023). Location Quotient Analysis in Determining Base And Non-Basic Sectors In East Java Province. *International Journal of Global Accounting, Management, Education, and Entrepreneurship*, 3(2), 101-116.
- Baharuddin, F. A., Rifai, M., & Selviani, L. (2024,). Legal Protection for Street Vendors in The Range of Increasing The Economic Innovation of Vendors (Case Study In The Cilacap Town Square). In *International Conference on Multidisciplinary Academic Studies*, 1(1), 119-127.
- Batool, K., Zhao, Z. Y., Irfan, M., & Żywiołek, J. (2023). Assessing the role of sustainable strategies in alleviating energy poverty: an environmental sustainability paradigm. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(25), 67109-67130.
- Cahyo, B. D., Setyowati, A. S., & Prabowo, A. (2022). Pearson Correlation Between Education Level and Population Growth on Poverty in Central Java, 2019-2021. *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 3(4), 174-180.
- Capasso, S., Cicatiello, L., De Simone, E., Gaeta, G. L., & Mourão, P. R. (2021). Fiscal transparency and tax ethics: does better information lead to greater compliance?. *Journal of Policy Modeling*, 43(5), 1031-1050.
- Firdaus, M., Alexandi, M. F., & Muhammad Alif, R. (2022). Poverty Determinants in the Provinces of Central Java and West Java with their Alleviation Strategies. *International Journal of Scientific Research & Engineering Trends*, 1(1), 1-11.
- Guo, Y., & Liu, Y. (2022). Sustainable poverty alleviation and green development in China's underdeveloped areas. *Journal of Geographical Sciences*, 32(1), 23-43.
- Kadarwati, K., Barokatuminalloh, B., & Ahmad, A. A. (2023). The Effect Of Balanced Funds On Poverty In Banjarnegara Regency, 2006-2022. In *Proceeding of Midyear International Conference* 2(1), 1-11.
- Kerihi, A. S. Y. (2024). The effect of human resources competency, individual morality and the control environment on village government accountability in managing village fund allocation in Kupang Tengah District, Kupang District. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 2(3), 437-449.
- Li, Z. (2024). Ethical frontiers in artificial intelligence: navigating the complexities of bias, privacy, and accountability. *International Journal of Engineering and Management Research*, 14(3), 109-116.
- Putri, R. S. W., Banowati, E., Utomo, C. B., Hayati, R., & Septiani, E. (2024). The Role of Basic Education In Improving The Quality of Life of Fisherman Families In Ujungalang Village, Kampung Laut District, Cilacap. In *International Conference on Science, Education, and Technology* , 10(1), 127-134.
- Ramdani, J., Kustiawan, I., & Junaidi, F. (2022). & Saputra, A.(2022). Contribution Of Green Social Workers in Handling the Impacts of Climate Change on the Realization of Sustainable Development in Cilacap Regency. In *Proceedings of International Conference on Studies in Education and Social Sciences*, 1(1), 274-282.

- Rudiastuti, A. W., Lumban-Gaol, Y., Silalahi, F. E., Prihanto, Y., & Pranowo, W. S. (2022). Implementing random forest algorithm in GEE: Separation and transferability on built-up area in Central Java, Indonesia. *JOIV: International Journal on Informatics Visualization*, 6(1), 74-82.
- Salcedo, S. T. L., Delgado, A. F., del Carmen Alcaide-Aranda, L. I., & Parks, D. I. G. (2023). Theoretical Approach: Accountability in Public Management. *International journal of health sciences*, 6(S7), 620-628.
- Saragih, J. R., Purwoko, A., & Asaad, M. (2024). Classifying Economic Sectors to Improve Regional Development Priorities in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 19(5).
- Setiawan, H. H., Nuryana, M. M., Susantyo, B., Purwanto, A. B., & Sulubere, M. B. (2021). Social entrepreneurship for beneficiaries of the Program Keluarga Harapan (PKH) toward sustainable development. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 739(1), 1-11.
- Singh, P. K., & Chudasama, H. (2020). Evaluating poverty alleviation strategies in a developing country. *PloS one*, 15(1), e0227176.
- Suranto, S., Miru, S., & Hatma, R. (2021). The Influence Of Village Funds, Spending On Social Protection Functions, And Capital Expenditures On The Regional Revenue And Expenditure Budget On Poverty Levels In Indonesia. *Tadulako International Journal Of Applied Management*, 3(3), 60-69.
- Suryaningrum, O. A., Mulyanto, E. G., & Gravitiani, E. (2021). Analysis of Factors Affecting Poverty Levels: a Study of Central Java Province. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 5(12), 292-301.
- Susanto, J., & Sulaiman, N. F. (2022). Economic Prospects and International Labor Migration. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Sutriyono, A., Darmawati, D., & Laksana, R. D. (2020). Urgency Working Model And Culture With An Online Based Financial Management System As An Efforts Of Performance Assessment At Bppkad Cilacap District. In *Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage*, 1(1). 238-247.
- Upton, H., Hampton, A. R., & Eccleston-Turner, M. (2024). Accountability, transparency and good governance: the WHO's decision-making during an emergency. *Governance, democracy and ethics in crisis-decision-making*, 172.
- Wijaya, A. R., & Diana, B. A. (2024). Strategy to Improve the Performance of Village Apparatus in Public Services at the Karangjati Village Hall Office, Sampang District. In *International Conference on Multidisciplinary Academic Studies*, 1(1), 1-12.
- Zameer, H., Shahbaz, M., & Vo, X. V. (2020). Reinforcing poverty alleviation efficiency through technological innovation, globalization, and financial development. *Technological Forecasting and Social Change*, 161, 120326.